

EKSISTENSI PEMANFAATAN DAN MASA DEPAN TANAH ADAT DI WILAYAH KELURAHAN RUMOONG BAWAH KECAMATAN TOMBASIAN AMURANG

Oleh : Arie V. Sendow¹

A. PENDAHULUAN

Masalah tanah merupakan salah satu persoalan paling pokok dalam kehidupan manusia. Ini karena di atas tanah itulah manusia mendirikan rumah untuk tempat tinggal, gedung untuk menjalankan usaha, ataupun menanaminya untuk memetik hasilnya. Malahan masalah tanah makin menonjol akhir-akhir ini karena jumlah manusia bertambah dengan pesat sedangkan luas tanah tetap seperti sediakala. Masalah tanah sejak dahulu memang sudah merupakan masalah penting, maka dalam hukum-hukum adat dari masyarakat-masyarakat adat di Indonesia sudah dikenal pengaturan-pengaturan mengenai tanah. Pengaturan-pengaturan ini terkadang dalam kebiasaan-kebiasaan setempat. Demikian pula dalam hukum-hukum adat di Minahasa sudah dikenal adanya pengaturan mengenai pemanfaatan tanah.

Tetapi, sesuai dengan perkembangan zaman di mana makin tersa kebutuhan untuk peraturan-peraturan yang tertulis, maka di Indonesia telah dibentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang diundangkan dalam Lembaran Negara 1960-104 dan mulia berlaku sejak tanggal 24 September 1960. menurut bagian kelima dari undang-undang tersebut, undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria. Berlakunya UUPA telah membawa pengaruh besar terhadap hukum adat mengenai tanah. Dalam Bagian Penjelasan Umum, angka III (dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum) pada butir (1) dikatakan antara lain bahwa:

“Dengan sendirinya Hukum Agraria baru itu harus sesuai dengan kesadarn hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbnesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnahkan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dalam huibubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia”.

Dalam bagian penjelasan itu dikatakan bahwa dasar hukum agraria yang baru, yakni hukum agraria dalam UUPA, adalah hukum adat. Tetapi, rumusan, aturan-aturan dalam UUPA tersebut bukanlah merupakan penjelmaan dari hukum adat sebagaimana adanya dalam kenyataan masyarakat, melainkan hukum adat yang telah :

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

1. Disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dalam hubungannya dengan dunia internasional dan
2. Disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.
3. Dengan demikian, hukum adat itu sendiri, yaitu hukum adat yang asli, didesak ke belakang digantikan oleh apa yang dinamakan hukum adat yang telah disempurnahkan dan disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu.
4. Hukum adat mengenai tanah yang paling terkena pengaruh UUPA adalah berkenaan dengan tanah-tanah yang luas yang menurut hukum merupakan tanah bersama untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, yang dinamakan tanah ulayat.

Keadaan ini berlaku juga bagi daerah Minahasa, dimana hukum adat mengenai tanah makin terdesak. Sebagian tempat di Minahasa tidak lagi mengenal apa yang dahulu dinamakan tanah kalakeran (bahasa Tombulu, dengan asal kata laker = banyak). Berikutnya yang juga terkena di Minahasa adalah tanah-tanah luas yang diakui sebagai kepunyaan bersama suatu keluarga besar karena tanah-tanah itu dianggap dahulu kala dibuka oleh leluhur mereka yang disebut dotu. Tanah-tanah ini oleh L. Adam seorang “controleur Binenlandsch-Bestuur ter beschikking van den Resident van Menado”, yang menulis bukunya dipermulaan abad ke-20, disebut “Tanah-tanah keluarga” (*tana Kalakeran un teranak tb.*)².

Menurut pengamatan (observasi) penulis karya ilmiah ini, untuk wilayah Kecamatan Tombasian Amurang, apa yang dalam bahasa Tombulu tersebut *tana kalakeran un teranak*, tinggal penduduk wilayah Kelurahan Romoong Bawah yang mengaku memiliki tanah-tanah sedemikian dengan area yang cukup luas.

Karenanya, menurut pendapat penulis karya ilmiah ini perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana kebenarannya saat ini, pemanfaatannya dan masa depan tanah-tanah demikian di wilayah-wilayah tersebut sertidak-tidaknya dengan penelitian ini akan dapat diketahui dengan jelas bagaimana proses lenyapnya suatu lembaga hukum, yaitu lembaga hukum yang sudah merupakan tradisi selama beberapa ratus tahun kemudian berangsur-angsur lenyap dilindas oleh perkembangan zaman. Karenanya, dalam rangka penulisan karya ilmiah ini merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya di bawah judul “Keberadaan”, pemanfaatan dan Masa Depan Tanah-tanah Adat Keluarga di Wilayah Kelurahan Rumoong Bawah kecamatan Tombasian Amurang”,

² L. Adam, *Adat Istiadat Sukubangsa Minahasa*, Terjemahan Dewan Redaksi Sari Terjemahan Karangan-karangan Belanda dengan Kata Pengantar oleh Mr G.M. A. Ingkiriwang, Bhatara, Jakarta, 1976, hal. 90

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Tanah Adat di Kelurahan Rummong Bawah Kecamatan Tombasian Amurang?.
2. Apa ada manfaat Tanah Adat di Kelurahan Rumooong Bawah Kecamatan Tombasian Amurang?
3. Bagaimana Masa Depan Tanah Adat di Kelurahan Rumooong Bawah Kecamatan Tombasian Amurang?

C. METODE PENULISAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).²

D. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Tanah-Tanah Adat Di Wilayah Kelurahan Rumooong Bawah Kecamatan Tombasian Amurang

Beberapa data umum, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, dan pekerjaan, mengenai Kelurahan Rumooong Bawah adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Data		Jumlah
1..	Luas Wilayah	Pemukiman	21,5 ha
		Kepolisian	4.900 ha
2.	Jumlah Penduduk	Keseluruhan	3.900
		Perempuan	2.0050
		Laki-laki	1.850
3.		PNS	59
		ABRI	1
		Swasta	62
		Pedagan	38

²Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

	Tukang	7
	Nelayan	61
	Pensiunan	4

Sumber : Data Kantor Kelurahan Rumoong Bawah kecamatan Tombasian Amurang 2012.

Nama-nama kepala pemerintahan sebagaimana menurut data yang di Kantor Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Tombasian Amurang

No.	Nama	Tahun
1.	Mamarimbing (Tonaas Wangko)	1898-1992
2.	Kumendong (Tonaas)	1994-1993
3.	Lokey (Tnaas)	1995-1996
4.	J. Rumengan (Perwis Sendangan)	1996-997
5.	I. Tamburian (Perwis Talikuran)	1997-998
6.	Johan Runtuwene	1998-1999
7.	Hendrik Runtuwene	1999-2000
8.	Manuel Runtuwene	2000-2001
9.	Abednigo Walokow	2001-2002
10.	J. Karepu	2002-2003
11.	Frans Kami	2003-2004
12.	Hendrik Ludong	2004-2005
13.	A. J. Runtuwene	2005-2006
14.	F. E. Ludong	2006-2007
15.	Marthen Karepu	2007-2008
16.	J. B. Mawa	2008-2009
17.	J. Runtuwene	2009-2010
18.	J. D. Mawa	2011 s/d sekarang

Sumber : Data Kantor Kelurahan Rumoong Bawah 2009-2010

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Rumoong Bawah masih terdapat tanah-tanah yang oleh masyarakatnya dipandang sebagai tanah-tanah adat. Wilayah Kepolisian Rumoong Bawah, setelah dikurangi dengan wilayah pemukiman dan tanah-tanah yang telah memiliki sertifikat, dipandang oleh masyarakatnya sebagai tanah adat Tanah-tanah adat tersebut diberi nama tertentu, kebanyakan menurut nama “dotu”, yaitu:

Tanah adat Tonaas	Tanah adat Walewangko
Tanah adat Lokey	Tanah adat Kotambunan
Tanah adat Rampisela	Tanah adat Talumepa
Tanah adat Moncing	Tanah adat Timbang
Tanah adat Monday	Tanah adat Woluku
Tanah adat Monday kecil	Tanah adat Rontos
Tanah adat Monday besar	Tanah adat Monalu
Tanah adat Runtuwene Moncing	Tanah adat Krisen
Tanah adat Boki Moncing	Tanah adat Rambakan

Apa yang disebutkan di atas adalah tanah-tanah adat yang memiliki luas yang cukup besar. Selain itu masih terdapat sejumlah tanah adat yang luasnya tinggal kecil saja, sehingga telah jarang disebut-sebut.

2. Pemanfaatan tanah-tanah adat di wilayah kelurahan rumoong bawah kecamatan tombasian amurang.

Berkenaan dengan pemanfaatan tanah-tanah adat di wilayah Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Tombasian Amurang, pertama-tama perlu dikemukakan peran dari apa yang oleh masyarakat Rumoong Bawah dikenal dan disebut sebagai *Hulu Waris*. Hal ini karena apa yang menjadi tugas *Hulu Waris* sangat penting bagi masyarakat adat, *Hulu Waris* disumpah oleh Tonaas sebelumnya. a. l. seekor ayam yang masih hidup dipuntir/diputar kepalanya sehingga mati, sebagai lambang apabila hulu waris yang disumpah itu nantinya dalam tugasnya memberikan keterangan yang tidak benar, maka hidupnya akan berakhir seperti berakhirnya riwayat ayam tadi tersebut diatas.

Dengan demikian sebelum membuka/merombak sebidang tanah adat, orang yang berkehendak membuka tanah tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan/menanyakan kepada *Hulu Waris*, sebagai orang yang tahu seluk-beluk tanah tersebut. Tetapi sekarang merupakan kenyataan bahwa kedudukan dan peran hulu waris telah amat jauh berkurang, ini tampak dalam beberapa peristiwa di mana ada orang yang sebenarnya tidak mempunyai hak atas sesuatu bidang tanah adat, tapi mereka membuka tanah itu tanpa meminta izin hulu waris. Ketika peristiwa itu di bawah ke pengadilan oleh orang yang mempunyai hak (mata ange) berdasarkan keturunan atas tanah itu, tapi oleh pengadilan yang menurut hukum adat tidak mempunyai hak itu, dimenangkan.

Pertimbangan pengadilan adalah dengan demikian kalangan masyarakat Rumoong Bawah telah beredar informasi bahwa hukum adat sudah terkikis oleh UUPA. Itu berarti bahwa dengan adanya UUPA, serta peraturan pelaksanaan lainnya, maka hukum adat tidak lagi dipakai.

3. Masa depan tanah-tanah adat di wilayah kelurahan rumoong bawah kecamatan tombasian amurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tua-tua adat Kelurahan Rumoong Bawah, penulis memperoleh kesan bahwa Kelurahan Rumoong Bawah hulu Waris yang ada sekarang akan merupakan *Hulu Waris* yang terakhir. Apabila hulu waris yang sekarang meninggal dunia, maka tidak ada lagi acara untuk mengangkat *Hulu Waris* yang baru. Di dalam kalangan masyarakat Kelurahan Rumoong Bawah, sebagaimana telah dikemukakan di atas, telah beredar informasi bahwa hukum adat sudah terkikis oleh UUPA, sedangkan oleh sebagian masyarakat hal itu menimbulkan perasaan tidak puas.

Berikut penulis akan melihat masalah itu dari sudut pandanag UUPA.. Penjelasan umum UUPA, pada angka II butir (2) menyatakan bahwa “Azas

domein” yang mempergunakan sebagai dasar daripada perundang-undangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru. Atas dasart domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan azas daripada Negara yang merdeka dan modern. Berhubungan dengan ini azas tersebut, yang dipertegas dalam berbagai “pernyataan domein”, yaitu misalnya dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit (S.1870-118), S. 1975-119a, S. 1874-55 dan S. 1808-58 ditinggalkan pernyataan-pernyataan domein itu dicabut kembali.

Apabila tanah-tanah adat di Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Tombasian Amurang merupakan tanah dengan hak ulayat, masih ada kemungkinan bahwa masyarakat memiliki hak atas tanah-tanah tersebut semata-mata berdasar Hukum Adat. Tetapi tanah-tanah keluarga yang didasarkan pada hukum adat di Kelurahan Rumoong Bawah pada hakekatnya bukanlah tanah dengan hak ulayat. Tanah-tanah adat di Rumoong Bawah merupakan tanah-tanah keluarga, jadi bukan tanah yang dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh warga Rumoong Bawah.

E. PENUTUP

Masyarakat Kelurahan Rumoong Bawajh Kecamatan Tombasian Amurang masih mengenal tanah-tanah keluarga yang didasarkan pada Hukum Adat. Luas keseluruhan tanah-tanah tersebut yang belum digarap adalah lebih kurang 1633 hektar. Masyarakat Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Tombasian Amurang, juga masih memiliki Hulu Waris, yaitu orang yang tugasnya sebenarnya adalah tempat bertanya tentang batas-batas tanah adat, serta yang berhak mengizinkan orang yang ditimbangnya mempunyai hak (maka ange) atas suatu tanah keluarga berhak menolak mengolah sebidang tanah adat. Tanah-tanah keluarga yang didasarkan pada hukum adat di Masyarakat Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Tombasian Amurang oleh beberapa putusan pengadilan dipertimbangkan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Putusan-putusan itu memenangkan orang yang nyatanya telah mengolah sebidang tanah sekalipun menurut Hukum Adat ia tidak berwenang untuk mengelolanya.

Undang-undang Pokok Agraria telah mengakibatkan tanah-tanah keluarga yang didasarkan pada Hukum Adat tersebut dipandang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Karenanya pula, dalam pendapat tua-tua adat. Hulu waris yang ada sekarang sudah merupakan Hulu Waris yang terakhir karena kedudukan dan peran Hulu Waris sudah jauh berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Adam L., *Adat Istiadat Sukubangsa Minahasa*, Terjemahan Dewan Redaksi Seri Terjemahan Karangan-karangan Belanda, Bhratara, Jakarta, 1976.

- Haar Ter. Mr., *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto dari "Beginnelsen en Stalsel van het Adatrecht", Pradnya Paramita, Jakarta, cet. Ke-7, 1983.
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, cvet ke-2 1981.
- Redaksi PT Ichtiar Baru Van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT. Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Tanpa Penerbit, Jakarta, cet ke-9 1966.

Sumber Lain:

- Hasil wawancara dengan *Frifedryk Mintalangi*, 84 tahun sebagai *Hulu Waris dan tua-tua Kampung lainnya*.
- Data dari *Kantor Kelurahan Rumoong Bawah Kecamatan Tombasian Amurang*.
- Undang-undang RI No. 10 tahun 1992 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.